

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Eskploitasi satwa liar seringkali terjadi di Indonesia. Pada kenyataannya perdagangan dari satwa liar dapat dikatakan legal apabila mengikuti aturan dan ketentuan ekspor maupun impor yang terdapat peraturannya dalam Undang-Undang di negara kita. Negara kita yang memiliki SDA, Indonesia sendiri memiliki keragaman satwa yang sangat tinggi.

Diantara keanekaragaman satwa yang ada di Indonesia tersebut terdapat beberapa diantaranya yang merupakan satwa endemik atau satwa asli Indonesia itu sendiri seperti Komodo, Anoa, Landak Jawa dan masih banyak lagi yang memiliki karakteristik dan ciri khas yang unik pada setiap individu mereka. Oleh karena itu, diperlukan adanya perlindungan dan konservasi agar satwa-satwa endemik Indonesia ini tetap terjaga keberadaanya dan tidak punah.

Landak Jawa atau dengan nama latin *Hystrix Javanica* merupakan jenis hewan dengan kategori pengerat dalam suku Hystricidae yang merupakan satwa istimewa endemik dari Indonesia yang hanya ada pada wilayah tertentu dan tidak dapat ditemui di wilayah lain sehingga

dikhawatirkan apabila semakin banyaknya perburuan liar terhadap satwa ini dapat menyebabkan kepunahan di beberapa tahun mendatang. Satwa ini berfungsi sebagai pengurai dan juga pengendali serangga secara alami di habitatnya sehingga tidak terjadi pelonjakan populasi serangga yang nantinya akan merugikan bagi para petani juga. Landak Jawa seringkali diburu oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dikarenakan di beberapa daerah dipercaya apabila mengkonsumsi Landak Jawa ini dapat menjadi obat bagi penyakit tertentu. Selain itu, daging dari Landak Jawa ini juga seringkali digunakan sebagai bahan sate. Ekosistem dari Landak Jawa ini yaitu pada dataran rendah, kaki bukit dan beberapa daerah area pertanian.

Tingginya konflik mempertemukan antara manusia dan juga satwa terutama Landak Jawa disebabkan karena rendahnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat dan juga rendahnya upaya dari hukum yang ditegakkan di Indonesia. Dari tahun 2013 hingga tahun 2020 terdapat sekitar 39 kasus penyitaan Landak oleh pemerintah Indonesia dengan jumlah 452 ekor landak¹. Perdagangan dari Landak Jawa ini dieksploitasi secara meluas bahkan mancanegara seperti Indonesia, Singapura dan Malaysia yang merupakan zona perdagangan ilegal dari Landak Jawa ini. Pada tahun 2019 terdapat sebanyak 121 penawaran dan sekitar 680 hingga 1.332 ekor Landak Jawa dengan aktivitas jual beli secara daring dan Indonesia terutama di Jawa merupakan mayoritas dari pelaku jual beli tersebut.

¹ Lalita Gomez, "The Illegal Hunting and Exploitation of Porcupines for Meat and Medicine in Indonesia," *Nature Conservation* 43 (January 1, 2021): 109–22, <https://doi.org/10.3897/NATURECONSERVATION.43.62750>.

Hasil dari perburuan satwa liar ini kemudian dipasarkan oleh penjual dari pasar gelap yang kemudian dibeli oleh kolektor dengan harga yang sangat fantastis. Adapun bagian tubuh dari beberapa satwa tersebut yang kemudian dipercayai sebagai obat alternatif apabila diolah. Pada beberapa bulan yang lalu yaitu pada bulan Maret 2024 juga disebutkan mengenai kasus yang menimpa I Nyoman Sukea seorang WNI Bali yang ditangkap oleh Ditreskrimsus Polda Bali dikarenakan memelihara empat ekor Landak Jawa yang merupakan salah satu satwa yang dilarang untuk dipelihara tanpa adanya izin konservasi terhadap pemerintah.

Atas pemeliharaan Landak Jawa tersebut, I Nyoman Sukea terdakwa Pasal 21 Ayat (2) dan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No.5 tahun 1990 mengenai Konservasi SDAHE. Selain dari sisi Landak Jawa adapun hewan endemik yang juga diburu oleh pelaku pemburu gelap atau *poacher* yang tidak bertanggung jawab, salah satunya yaitu satwa yang memiliki keunikan di kulitnya trenggiling. PPH Ditjen Gakkum Sustyio Iriyono menjelaskan bahwa sejak tahun 2015 hingga tahun 2019, kegiatan operasi mengenai pemberantasan trenggiling telah berhasil mengamankan sekitar 1.840 trenggiling dengan kondisi mati, 17 ekor trenggiling hidup dan juga sekitar 67 kg sisik dari trenggiling².

Dengan adanya beberapa kasus perdagangan dan juga perburuan dari satwa langka dan juga endemik di beberapa negara terutama di

² Ryan Suryadi, "RRI.Co.Id - KLHK Gagal Sejumlah Perdagangan Satwa Dilindungi Selama 2024," 28 November 2024, 2024, <https://rri.co.id/kriminalitas/1151377/klhk-gagalkan-sejumlah-perdagangan-satwa-dilindungi-selama-2024>.

Indonesia, melalui *World Conservation Union* pada tahun 1963 membentuk sebuah rezim diluar Indonesia yaitu CITES guna membatasi serta juga mencegah perdagangan fauna langka dengan illegal³. CITES sendiri pada dasarnya mengatur mengenai bagaimana proses perdagangan satwa liar dengan kategori spesies terancam punah. Menurut Kisnu Widagso yang menjabat di Departemen Kriminologi FISIP UI sebagai Ketua Program Studi Sarjana menjelaskan mengenai nilai perdagangan satwa liar secara illegal ini pada tahun 2017-2018 terdapat sekitar 7 atau 8 miliar hingga sekitar 20 miliar dollar amerika per tahun kerusakan sebesar 9 triliun tiap tahunnya tersebut tidak termasuk kerusakan mengenai ekosistem dan juga hilangnya keragaman alam dan juga jenis satwa tertentu⁴.

Di Indonesia sendiri sebagai salah satu anggota dari CITES ini untuk memperdagangkan satwa langka membutuhkan beberpa dokumen yang harus disetujui dan sesuai dengan ketentuan dari otoritas konservasi pengelola yang kemudian disesuaikan Kembali dengan ketentuan yang tertera di dalam CITES. Semenjak tahun 1978 negara kita sendiri telah menjadi bagian dari CITES dan mengadopsi CITES melalui Keputusan Pemerintah pada No. 43 di Tahun 1978. Dan berorientasi Peraturan yang dibentuk Pemerintah pada Nomor 8 di tahun 1999 yang diwakilkan KKH

³ Atthoriq Istawa Faqih, "Mengenal CITES, 'Pelindung' Fauna Dan Flora Yang Terancam Punah," Detik Jabar, 2023, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6596709/mengenal-cites-pelindung-fauna-dan-flora-yang-terancam-punah>.

⁴ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, "Perdagangan Dan Peredaran Satwa Liar Berbasis Daring Merugikan Negara Sebesar 9 Triliun – Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik – Universitas Indonesia," FISIP UI, 2022, <https://fisip.ui.ac.id/perdagangan-dan-peredaran-satwa-liar-berbasis-daring-merugikan-negara-sebesar-9-triliun/>.

sebagai otoritas dari pengatur jalan CITES di region lokal dan LIPI sebagai penanggung jawab dari kelimuan CITES tersebut.

Adapun perundang-undangan mengenai protektifitas dari satwa ini yaitu pada UU No. 5 pada tahun 1990 mengenai SDA terbarukan dan lingkungannya yang juga menjadi bentuk ratifikasi terhadap CITES⁵. Indonesia sendiri membutuhkan waktu kurang lebih puluhan tahun membuat UU tersebut dapat diterbitkan. Indonesia juga menempuh waktu kurang lebih 10 tahun untuk pengesahan dari Undang-Undang tersebut. Yang dimaksud peraturan pelaksana disini yaitu Peraturan dari Pemerintah yaitu No. 7 pada tahun 1999 yang berisi mengenai Jenis Flora dan Fauna Pengawetan. Kemudian Peraturan oleh Pemerintah No. 8 pada tahun 1999 yang membahas mengenai Eksploitasi Flora dan Fauna liar.

Indonesia sendiri juga telah membentuk beberapa badan pengelolaan yang dibentuk atas respon dari keanggotaan Indonesia dalam CITES itu sendiri yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH). Badan penegakan hukum KLHK sendiri telah melakukan sekitar 2000 bentuk skema mengenai keamanan terhadap ekosistem di Indonesia dan juga

⁵ Indah Kusuma Darafaulika, "IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PERNIAGAAN TANPA IZIN TERHADAP SATWA YANG DILINDUNGI DI INDONESIA (Studi Kasus Di POLRES PELABUHAN TANJUNG PERAK SURABAYA)," Semantic Scholar, 2018, <https://123dok.com/document/ye3pnd4q-implementasi-penegakan-perniagaan-terhadap-dilindungi-indonesia-pelabuhan-surabaya.html>.

sekitar 1.354 perkara pidana mengenai perdagangan tersebut telah dibawa menuju pengadilan⁶.

Adanya kebijakan ataupun institusi yang mengatur mengenai lingkungan sangat diperlukan sehingga kestabilan serta keseimbangan aspek ekonomi, sosial dan juga politik dapat berjalan secara bersamaan tanpa adanya degradasi dari lingkungan itu sendiri. Dengan adanya kebijakan ataupun institusi yang mengatur mengenai lingkungan ini suatu negara dapat secara maksimal memanfaatkan kekayaan alam mereka dengan memperhatikan mengenai keberlanjutan dari ekosistem lingkungan tersebut. Terutama Indonesia yang Sebagian besar perekonomiannya bergantung pada kekayaan alam yang dimiliki di negara ini.

1.2 Rumusan Masalah

Apabila dilihat dari isu diatas, penulis dapat menemukan rumusan masalah sebagai berikut “Bagaimana Kebijakan Indonesia dalam kasus penyitaan dan perburuan spesies Landak Jawa sebagai bentuk ratifikasi dari CITES”

⁶ N Anugrah, “Penadah Jaringan Perdagangan Satwa Liar Dilindungi Antar Pulau Di Makassar Siap Disidangkan. Retrieved from Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia,” Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023, https://www.menlhk.go.id/site/single_post/5441/.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sasaran yang diharapkan penulis dalam thesis ini yaitu dapat menemukan mengenai pengaruh yang dihasilkan oleh CITES terhadap pengaruhnya dalam hukum di Indonesia mengenai penanganan satwa dilindungi dan larangan pemeliharaan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Kegunaan secara akademik, pada thesis ini dapat bermanfaat sebagai kepekaan terhadap isu-isu lingkungan yang terjadi terutama pada perdagangan dan perburuan satwa liar yang ada di Indonesia.
2. Manfaat secara praktis, dengan adanya thesis ini dapat berfungsi menjadi acuan terhadap peneliti lain yang berkaitan dengan CITES.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama ditulis oleh Yoshua Aristides, Agus Purnomo, Adji Sumekto dengan judul **“Perlindungan satwa langka di Indonesia dari perspektif *Convention on International Trade in Endangered Species of Flora and Fauna (CITES)*”**⁷. Pada penelitian menjelaskan

⁷ Yoshua Aristides, Agus Purnomo, and Fx Adji Samekto, “PERLINDUNGAN SATWA LANGKA DI INDONESIA DARI PERSPEKTIF CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF FLORA AND FAUNA (CITES),” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (October 11, 2016): 1–17, <https://doi.org/10.14710/DLJ.2016.13741>.

mengenai bagaimana CITES ini dapat membantu untuk membuat Undang-Undang pada tahun 1990 yang berisi mengenai Sumber Daya Alam terbarukan dan lingkungan hidupnya dan juga BKSDA yang berperan untuk penindakan tugas untuk melakukan tindakan serta konservasi untuk mencegah adanya perdagangan dan juga perburuan satwa langka illegal.

Disebutkan juga mengenai Hukum Lingkungan Internasional yang dimana pada prinsipnya sesuai untuk hal-hal seperti isu-isu pencemaran lingkungan seperti laut dan atmosfer, beberapa spesies yang dilindungi dan beberapa suaka alam, penipisan sumber daya alam karena eksploitasi yang terlalu tinggi dan pemantauan standar dari baku mutu lingkungan internasional.

Pada penelitian pertama ini hanya berfokus pada peraturan yang dibuat oleh Indonesia dan tidak berfokus pada CITES yang berperan sebagai Rezim Internasional. Akan tetapi, dalam penelitian ini banyak disajikan data mengenai bagaimana satwa langka di Indonesia tersebut di perjualbelikan yang dimana data tersebut sangat berguna bagi penelitian saya.

Penelitian kedua ditulis oleh Offel M. Panwar dengan judul **“Pengaturan Internasional Tentang Pencegahan Perdagangan Hewan dan Tumbuhan Terancam Puna (CITES) dan Kaitannya dengan Perlindungan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Indonesia”**⁸. Pada penelitian ini juga menjelaskan mengenai peraturan

⁸ Offel M Panawar, Cornelis Dj Massie, and Thor Bangsaradja Sinaga, “PENGATURAN INTERNASIONAL TENTANG PENCEGAHAN PERDAGANGAN HEWAN DAN TUMBUHAN TERANCAM PUNAH (CITES) DAN KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA DI

internasional mengenai perdagangan satwa dan juga tumbuhan internasional sehingga dapat dijadikan perlindungan agar ekosistem tetap terjaga di setiap negara berdasar pada piagam PBB dan juga prinsip-prinsip hukum internasional.

Disebutkan juga peraturan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 dibentuk dikarenakan adanya kesadaran bahwa sumber daya alam hayati sangat penting dan perlu dikelola dengan baik agar bermanfaat dan menunjang kesejahteraan dari masyarakat Indonesia itu sendiri.

Pada penelitian ini, tidak terlalu banyak menyajikan data yang dapat digunakan dalam penelitian saya. Akan tetapi, dalam penelitian tersebut lengkap menjelaskan mengenai bagaimana sejarah dari proses pembuatan CITES dan bagaimana Indonesia menerapkan CITES tersebut pada hukumnya.

Penelitian ketiga ditulis oleh Mohammaf Wildhan Firmansyah Zam Zamy dengan judul **“EFEKTIVITAS REZIM CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA (CITES) DALAM MENANGANI PERDAGANGAN GADING DI JEPANG PASCA *THE 17TH CONFERENCE OF THE PARTIES (COP17)*”**⁹. Pada penelitian ini penulis mencoba menjelaskan mengenai tingginya tingkat perdagangan

INDONESIA,” *LEX ET SOCIETATIS* 9, no. 1 (January 12, 2021), <https://doi.org/10.35796/LES.V9I1.32049>.

⁹ Mohammad Wildhan Firmansyah Zam Zamy, “Efektivitas Rezim Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) Dalam Menangani Perdagangan Gading Di Jepang Pasca The 17th Conference of the Parties (CoP17),” August 8, 2022.

ilegal terhadap gading gajah yang terjadi di Jepang meskipun “Negeri Sakura” ini masuk Kategori 1 proyek Legislasi Nasional dari CITES. Di Jepang wadah atau pasar domestik legal terhadap gading yang secara dapat berpengaruh terhadap tingginya perburuan dan perdagangan dari gading gajah secara ilegal yang dimana hal tersebut bertentangan dengan tujuan utama dari dibentuknya CITES. Peneliti menemukan bahwa efektivitas dari CITES di Jepang ini tergolong kurang dikarenakan adanya tidak sepaham terhadap pandangan mengenai perdagangan gading diantara negara anggota dari CITES. Adapun kepentingan nasional dari Jepang yang tetap mengutamakan adanya pasar domestik perdagangan gading secara legal dan juga kapabilitas dari CITES yang dianggap lambat dan juga kurang kuat dalam menangani dan juga menegakkan aturan mereka.

Dalam penelitian ini membahas secara spesifik mengenai bagaimana efektivitas dari CITES ini dalam menangani suatu isu atau permasalahan tertentu. Akan tetapi, pada penelitian ini tidak menjelaskan mengenai permasalahan yang terdapat di Indonesia sebagaimana penelitian saya.

Penelitian keempat di tulis oleh Putu Leong Uni Berta dengan judul **“PERAN CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED OFFLORA AND FAUNA (CITES) DALAM MELINDUNGI ORANG UTAN INDONESIA DARI PERDAGANGAN BEBAS DI TINGKAT INTERNASIONAL 2015-**

2022¹⁰”. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa adanya peran dari CITES dalam penetapan UU No. 5 Tahun 1990 mengenai konservasi SDA terbarukan di Indonesia. Di dalam undang-undang ini juga mengatur mengenai pemanfaatan, perlindungan, dan juga sanksi bagi mereka yang menjadi oknum perdagangan orang utan ilegal di negara kita. Apabila menurut PP. No. 7 pada tahun 1999, semua spesies dari orang utan merupakan hewan yang dilindungi keberadaannya. Kemudian juga terdapat PP. No. 8 pada Tahun 1999 yang menetapkan terhadap aturan pemanfaatan fauna di Indonesia yang membatasi dari pemanfaatan orang utan itu sendiri. PP No. 13 Tahun 1994 menetapkan aturan terhadap satwa buru yang bersifat melindungi satwa termasuk orang utan dan Keputusan Menteri No.447/Kpts-II/2003 yang menetapkan proses, prosedur, dan juga proses administratif yang wajib untuk diikuti terhadap kasus penyitaan orang utan.

Pada penelitian tersebut, hanya membahas mengenai bagaimana CITES tersebut dapat mempengaruhi hukum terhadap perlindungan satwa primata orangutan dan tidak membahas mengenai satwa lain terutama landak jawa sebagai rujukan dalam penelitian saya. Akan tetapi, pada penelitian tersebut menjelaskan implementasi CITES yang kemudian menjadi bentuk ratifikasi Indonesia dalam membuat peraturan dan badan hukum yang dapat menjadi referensi dalam penulisan saya.

¹⁰ Berta Putu Leong Uni, “PERAN CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED OF FLORA AND FAUNA (CITES) DALAM MELINDUNGI ORANG UTAN INDONESIA DARI PERDAGANGAN BEBAS DI TINGKAT INTERNASIONAL - Unas Repository,” Universitas Nasional, 2023, <http://repository.unas.ac.id/9161/>.

Penelitian kelima ditulis oleh Tissa Zhafira dengan judul **“KEWAJIBAN NEGARA INDONESIA DALAM MELINDUNGI SATWA SESUAI DENGAN KETENTUAN DARI CITES (CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA)¹¹”**. Dalam jurnal atau skripsi ini menunjukkan bahwa sebagai Konvensi Internasional memiliki peranan yang sangat penting di Indonesia terutama dalam upaya konservasi. Indonesia sebagai bagian dari CITES melakukan beberapa program maupun peraturan yang dilakukan guna melestarikan populasi satwa. Dalam upaya konservasi tersebut mengalami beberapa kendala yang dibagi menjadi kendala teknis dan juga kendala non-teknis. Diantaranya yaitu regulasi nasional yang belum selaras dengan CITES sepenuhnya, Pengawasan terhadap perburuan dan perdagangan satwa secara ilegal yang dapat dikatakan kurang maksimal dan hukuman yang dijatuhkan terhadap oknum pelanggar dinilai kurang untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku.

Dalam penelitian ini, menjelaskan mengenai bagaimana hambatan Indonesia dalam proses praktek implementasi dari CITES itu sendiri yang dimana dapat menjadi rujukan yang sangat bagus terhadap penelitian saya.

¹¹ Tissa Zhafira, “(PDF) KEWAJIBAN NEGARA INDONESIA DALAM MELINDUNGI SATWA SESUAI DENGAN KETENTUAN DARI CITES (CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA),” ResearchGate, 2024, https://www.researchgate.net/publication/381884498_KEWAJIBAN_NEGARA_INDONESIA_DALAM_MELINDUNGI_SATWA_SESUAI_DENGAN_KETENTUAN_DARI_CITES_CONVENTION_ON_INTERNATIONAL_TRADE_IN_ENDANGERED_SPECIES_OF_WILD_FAUNA_AND_FLORA.

Akan tetapi, dalam penelitian ini tidak menyebutkan data mengenai status atau populasi dari satwa.

Melalui penelitian terdahulu terlihat perbedaan dalam melihat perdagangan dan perburuan flora dan fauna illegal di Indonesia. Berdasarkan penelitian terdahulu tidak membahas mengenai perlindungan terhadap landak jawa dan bagaimana hukum mengenai memburu, memelihara, mengeksploitasi satwa landak jawa tersebut. Pada kenyataannya, CITES berpengaruh besar dalam implementasi terhadap hukum di negara kita. Penelitian ini dikembangkan oleh penulis untuk meneliti bagaimana CITES tersebut dapat mempengaruhi hukum yang berlaku di Indonesia.

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	“Perlindungan satwa langka di Indonesia dari perspektif Convention on International Trade in Endangered Species of Flora and Fauna (CITES)”	<i>Socio Legal</i>	CITES ini dapat membantu untuk membuat Undang-Undang yang mengatur mengenai SDA Nomor 5 Tahun 1990 yang berisi mengenai SDA terbarukan dan lingkungannya. dan juga melalui Badan KSDA yang berperan untuk penindakan tugas untuk melakukan tindakan serta konservasi untuk mencegah adanya perdagangan dan juga perburuan satwa langka illegal.
2.	“Pengaturan Internasional Tentang Pencegahan Perdagangan Hewan dan Tumbuhan Terancam Punah (CITES) dan Kaitannya dengan Perlindungan Sumber	<i>Library Research</i>	menjelaskan mengenai peraturan internasional mengenai perdagangan satwa dan juga tumbuhan internasional sehingga dapat dijadikan perlindungan agar ekosistem tetap lestari di setiap negara berdasar pada piagam UN dan juga dasar hukum skala internasional. Disebutkan juga peraturan nomor 5

	Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Indonesia”		pada tahun 1990 dibentuk dikarenakan adanya kesadaran bahwa SDA yang bersifat hayati sangat penting serta perlu dikelola sebaik mungkin agar bermanfaat dan menunjang kesejahteraan dari masyarakat Indonesia itu sendiri.
3.	“EFEKTIVITAS REZIM CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA (CITES) DALAM MENANGANI PERDAGANGAN GADING DI JEPANG PASCA THE 17TH CONFERENCE OF THE PARTIES (COP17)”	Kualitatif	Keberhasilan CITES untuk mengatasi penjualan gading di “Negeri Sakura” setelah CoP17 dapat dikatakan termasuk rendah. Hambatan atau tantangan utama dari permasalahan tersebut yaitu adanya tidak sepaham antar aktor atau anggota dalam hal perdagangan gading dan juga kepentingan nasional dari Jepang itu sendiri yang dimana tetap mendukung adanya pasar domestik gading legal. Hal itu ditambah dengan adanya celah dalam regulasi domestik negara Jepang yang dimana turut dalam memfasilitasi perdagangan gading ilegal. Maka diperlukan langkah strategis dalam mendukung tujuan dari konservasi CITES.
4.	“PERAN CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED OF FLORA AND FAUNA (CITES) DALAM MELINDUNGI ORANG UTAN INDONESIA DARI PERDAGANGAN BEBAS DI TINGKAT INTERNASIONAL 2015-2022”	Kualitatif	Pada penelitian ini menunjukkan bahwa CITES memiliki pengaruh terhadap perlindungan orang utan dan bagaimana kontrol mengenai ekspor terhadap dunia internasional. Selain itu, peran dari CITES di Indonesia ini yaitu dengan melakukan penunjukan otoritas dari pengelola dan otoritas ilmiah sebagai representasi dari CITES itu sendiri di Indonesia.
5.	“KEWAJIBAN NEGARA INDONESIA DALAM MELINDUNGI	Yuridis Normatif	Indonesia sendiri telah menggugurkan kewajibannya dalam hal melindungi satwa liar seperti ketentuan yang telah di sepakati dengan CITES yaitu seperti meratifikasi perjanjian internasional,

<p>SATWA SESUAI DENGAN KETENTUAN DARI CITES (CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA)”</p>		<p>membentuk otoritas sebagai pelaku atau pengelola ratifikasi serta menyusun hukum atau regulasi terkait perlindungan satwa liar. Akan tetapi, dalam pelaksanaan atau implementasinya terdapat beberapa hambatan salah satunya yaitu keterlambatan dalam pelaporan perdagangan ilegal.</p>
--	--	---

1.5 Teori/Konsep

1.5.1 Intermestik

Thesis ini berfokus pada penelitian Intermestik dimana pendekatan ini merupakan suatu transformasi kebijakan publik karena terpengaruh oleh dinamika global. Konsep intermestik ini muncul dikarenakan dengan seiringnya fenomena globalisasi yang semakin meningkat¹². Adanya globalisasi ini kemudian menimbulkan tantangan bagi teorisasi mengenai kebijakan publik, akan tetapi tantangan tersebut tidak hanya pada kebijakan nasional yang dipengaruhi akibat referensi global dan jaringan ketetapan dunia yang dapat berpengaruh pada peraturan nasional itu sendiri. Keduanya saling berkaitan, antara bentuk peraturan yang terpengaruh oleh politik domestik serta bentuk peraturan yang terpengaruh oleh politik internasional.

Kebijakan luar negeri dapat terjadi dikarenakan adanya keterkaitan antara internasional dan domestik dalam menunjukkan masalah dan juga

¹² D. E. (Dyah) Kurniawati, “Pendekatan Intermestik Dalam Proses Perubahan Kebijakan: Sebuah Review Metodologis,” *Jurnal Studi Hubungan Internasional* 2, no. 2 (2012): 154–67, <https://www.neliti.com/publications/131965/>.

kepentingan yang dibutuhkan suatu negara. Dalam penelitian ini konsep atau pendekatan intermestik diterapkan untuk melihat mengenai bagaimana Indonesia sebagai aktor lokal atau domestik dalam perannya menjalankan ratifikasi pada kasus penyitaan satwa dilindungi dalam konteks ini yaitu Landak Jawa dan CITES sebagai aktor internasional yang mempengaruhi kebijakan domestik Indonesia mengenai perlindungan satwa dan larangan pemeliharaan satwa dengan status Appendix III CITES.

1.5.1.2 Intermestik Model Preferensi Global

Model preferensi global ini berdasar pada pemikiran liberalisme yang dimana politik sesungguhnya melibatkan beberapa aktor eksternal atau luar negara seperti kelompok kepentingan, *Non-Governmental Organization*, perusahaan multinasional, dan lain sebagainya¹³. Yang mana pada penelitian ini yaitu CITES yang merupakan sebuah rezim internasional yang mengatur mengenai kategori atau penggolongan satwa berdasarkan tingkat kelangkaannya dan endemik daerah dari satwa tersebut. Isu atau tantangan yang dibahas juga tidak hanya terbatas pada cakupan salah satu negara saja akan tetapi lebih luas. Model preferensi global ini juga memiliki peran yang cukup penting dikarenakan menunjukkan bahwa sebuah negara tidak serta merta menentukan kebijakan domestik negara tersebut terutama pada beberapa isu yang menyangkut mengenai bahasan komitmen

¹³ *Ibid*

internasional seperti hak asasi manusia, perubahan iklim dan perdagangan satwa liar.

Dalam penelitian ini, preferensi global dibuktikan dengan komitmen dari Indonesia sebagai aktor domestik dan CITES yang menyediakan pedoman bagi aktor domestik tersebut dalam menindak perdagangan ilegal dan pemeliharaan satwa tersebut di Indonesia. Indonesia juga perlu mempertimbangkan mengenai reputasi negaranya yang berkomitmen terhadap konservasi dari satwa-satwa dilindungi ini sehingga preferensi global menekan atau mendorong Indonesia agar memperkuat kebijakan domestiknya dalam pelaksanaan CITES di dalam negaranya.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Pada Thesis penggunaan dalam metode penelitian yang deskriptif dapat dijelaskan mengenai fenomena yang terjadi secara aktual dan juga sistematis mengenai fakta atau sebuah fenomena. Penelitian deskriptif berfokus pada pemecahan masalah secara aktual melalui bagaimana semestinya saat penelitian dilakukan. Dalam hal ini sebagai alat pemecah yang sederhana pada perkembangan dari ilmu. Thesis ini menggunakan deskriptif kualitatif dimana menjelaskan mengenai kebijakan Indonesia dan juga fenomena kasus perburuan dan penyitaan landak jawa sehingga penulis dapat memberikan data yang fakta dan secara aktual. Tujuan utama dari penelitian deskriptif ini yaitu memberikan sebuah gambaran atau suatu pandangan mengenai keadaan secara objektif. Data yang dikumpulkan juga

memiliki kemungkinan menjadi kunci pada objek penelitian. Pertanyaan dengan menggunakan kata mengapa, bagaimana dan alasan apa akan dimanfaatkan oleh penulis dalam penelitian¹⁴.

1.6.2 Metode Analisis

Metode penelitian data kualitatif yaitu sebuah pendekatan yang berdasarkan pada filsafat posypositivisme, dimana penulis merupakan instrument inti dan teknik dari kolektifitas data melalui metode gabungan, kajian data kualitatif dan juga hasil dari penelitian kualitatif tersebut lebih melakukan penekanan terhadap arti dari generalisasi¹⁵. Terdapat beberapa istilah mengenai penelitian kualitatif diantaranya yaitu penelitian naturalistic, interaksionis simbolik, perspektif ke dalam, fenomenologis, dan juga deskriptif. Menurut David Williams, penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang dimana menggunakan latar belakang alamiah yang dimaksudkan untuk menjelaskan mengenai fenomena yang terjadi dan juga melibatkan beberapa metode yang ada.

Thesis ini menerapkan metode telaah data secara kualitatif yang dimana untuk dapat memperoleh data melalui Analisa dan juga menggambarkan sebuah fenomena dengan akurat. Metode kualitatif ini juga lebih berfokus terhadap observasi sebuah realitas dan juga lebih mengkaji ulang pada pengertian pokok dalam realitas tersebut. Efektivitas dari

¹⁴ “Penelitian Kualitatif Prof. Dr. Lexy | PDF,” 2014, <https://www.scribd.com/document/360640095/Penelitian-Kualitatif-Prof-Dr-Lexy>.

¹⁵ Sugiyono, *Sugiyono - 2013 - Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D / PDF*, 2013, <https://www.scribd.com/document/671612229/Sugiyono-2013-Metode-Penelitian-Kuantitatif-Kualitatif-dan-R-D-1>.

pendekatan kualitatif ini juga dipengaruhi oleh ketajaman dari penggunaan kata.

1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian

1.6.3.1 Batasan Materi

Penulis memberikan cakupan materi yang berfokus terhadap bahasan mengenai komitmen Indonesia dan bagaimana Indonesia menjalankan ratifikasi dari CITES tersebut melalui KLHK dan BKSDA dalam hal penyitaan dan perburuan Landak Jawa. Hal ini dikarenakan masih banyaknya perdagangan yang dilakukan secara bebas dan ilegal dalam hal ini menggunakan media sosial sebagai sarana atau *platform* dalam memperdagangkan satwa tersebut.

Selain itu, penelitian ini juga akan berfokus mengenai bagaimana proses respon Indonesia mengenai adanya CITES untuk menerbitkan hukum yang mengatur mengenai perdagangan dan perburuan satwa dilindungi di Indonesia.

1.6.3.2 Batasan Waktu

Dalam thesis ini guna memfokuskan penelitian, cakupan waktu terhadap penulis yaitu pada 2018 hingga 2020 dikarenakan pada tahun tersebut berdasarkan data yang diperoleh penulis terdapat kasus mengenai kasus penangkapan, penyitaan dan pemeliharaan terhadap Landak Jawa tanpa adanya izin konservasi. Kemudian terdapat pula perlindungan terhadap landak pada tahun 2018 dan melibatkan komitmen dari Indonesia

itu sendiri dalam menjalankan perjanjian dari CITES yang telah disepakati beberapa tahun yang lalu yaitu semenjak dibentuknya ratifikasi terhadap Undang-Undang tahun 1990.

1.6.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Thesis ini menggunakan Penelitian Pustaka atau *library research* yaitu pengumpulan temuan berdasarkan pada berbagai sumber antara lain jurnal, skripsi, dan juga media elektronik. Data yang diperoleh tersebut kemudian diolah dan di analisis sehingga dapat digunakan sebagai uraian penelitian dan menjawab rumusan masalah dari penelitian ini.

1.7 Argumen Pokok

Thesis ini berfokus terhadap pembahasan studi Intermestik yang dimana pendekatan ini merupakan perubahan aturan publik yang terpengaruh oleh dinamika global. Penelitian ini menggunakan model preferensi global yang dimana negara tidak dapat serta merta membuat kebijakan domestik mereka dikarenakan terdapat beberapa isu-isu yang melibatkan pihak luar seperti NGO dan lain sebagainya. Pada penelitian ini yaitu CITES yang mengatur mengenai kategori atau penggolongan satwa berdasarkan tingkat kelangkaannya dan endemik daerah dari satwa tersebut mendorong atau menekan Indonesia yang telah meratifikasi CITES tersebut beberapa tahun yang lalu untuk dapat menjalankan ratifikasi tersebut dalam hal ini yaitu kasus penyitaan dan perburuan Landak Jawa di Indonesia. Hal ini tentu juga berpengaruh pada reputasi Indonesia itu sendiri di dunia

internasional dalam hal mempertahankan komitmen mereka dan posisi Indonesia pada bidang konservasi.

1.8 Sistematika Penulisan

<p>BAB 1 PENDAHULUAN</p>	<p>1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian 1.3.2 Manfaat Penelitian 1.4 Penelitian Terdahulu 1.5 Pendekatan dan Teori 1.5.1 Intermestik 1.5.1.2 Intermestik Model Preferensi Global 1.6 Metode Penelitian 1.6.1 Jenis Penelitian 1.6.2 Metode Analisis 1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian 1.6.3.1 Batasan Waktu 1.6.3.2 Batasan Materi 1.6.6 Teknik dan pengumpulan data 1.7 Argumen Pokok 1.8 Sistematika Penulisan</p>
<p>BAB II GAMBARAN UMUM CITES</p>	<p>2.1 Sejarah CITES 2.2 Tugas dan Fungsi CITES 2.3 Proses ratifikasi CITES di Indonesia 2.4 Kasus Perburuan, Penyitaan ataupun Pemeliharaan Satwa dilindungi dalam Lingkup Nasional dan Internasional</p>
<p>BAB III PERAN CITES TERHADAP HUKUM DI INDONESIA MENGENAI FLORA DAN FAUNA DILINDUNGI</p>	<p>3.1 Kebijakan Perlindungan Satwa di Indonesia sebagai respon terhadap CITES 3.2 Kebijakan Indonesia dalam kasus perburuan dan penyitaan Landak Jawa sebagai bentuk Appendix III CITES.</p>
<p>BAB IV PENUTUP</p>	<p>4.1 Kesimpulan 4.2 Saran</p>